

**EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN DESA
(PPD) MELALUI USAHA EKONOMI KELURAHAN SIMPAN PINJAM
(UEK-SP) DI KELURAHAN BUKIT KAYU KAPUR KOTA DUMAI
TAHUN 2012**

**Oleh :
Iqbal Wahid**

Dosen Pembimbing : Drs. Muhammad Ridwan
Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Email/Hp : iqbalwahid22@gmail .com / 085271891481

ABSTRACT

The research given title “Evaluation Implementation of The Program economic Enterprises Village saving and Loans (UEK/SP) at Bukit Raya Kapur Village, Dumai City in 2012”. It’s behind of this research is still a using funds loans not used according to plan the proposal loan lack of awareness of the public in paying the mortgage in addition it’s still a lot of people who do not in the criteria for low-income communities also enjoy this program and number of delinquent loans is higher as well the list of loans that are pilling up.

The aim of research is evaluation implementation of the program economic enterprises village saving and loans (UEK-SP) at Bukit Raya Kapur Village Dumai City in 2012. The usefulness of this research is as input agencies in an effort to take out policy in the future. Types and method of research is descriptive research, which can be defined as program solving or describe investigated by describing the state of the subject and object of research based on the facts that seem or how their. While the method used qualitative research method to describe the actual situation and the actual detail by looking at the problem and research objectives determined purposive based withdrawal nonprobability sample properties. Data was collected by interview and documentation.

The research that concludes evaluation implementation of program economic enterprises village saving and loans (UEK/SP) at Bukit Raya Kapur Village Dumai City in 2012 it’s “Not Good”. Where implementation of the TUPOKSI by UEK/SP has not been done well, so that people who received benefits from this program is not accurate and this is also due to the implementation of the verification that is not in accordance with existing guidelines so that the level of arrears communities become higher. Arrears by using so the roll can not be done every single month and also resulted in the list of loans the are pilling up. Futhermore, the absorption of funds which have not been up to touch the low-income communities that lack of venture capital.

The Key Word : Evaluation, Program, PPD, UEK/SP

A. Latar Belakang Masalah
Kemiskinan adalah persoalan mendasar yang menyentuh secara

langsung terhadap kelangsungan dan martabat suatu bangsa yang merdeka. Kemiskinan bagaimanapun ia

didefinisikan menampilkan sisi-sisi buruk yang menantikan suatu pemecahan. Dalam kurun waktu sepanjang kurang lebih sepuluh tahun terakhir ini, persoalan kemiskinan dan berbagai program yang diselenggarakan untuk mengatasi masalah kemiskinan menyita perhatian berbagai kalangan pemerhati masalah sosial.

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Mengacu pada strategi nasional penanggulangan kemiskinan, kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Di Kota Dumai sendiri persoalan kemiskinan masih menjadi agenda prioritas Pemerintah Kota Dumai, karena sampai saat ini masyarakat ekonomi lemah atau berada dibawah garis kemiskinan terus mengalami peningkatan, bahkan mendekati 40 ribu jiwa atau sekitar 15 persen dari jumlah penduduk Kota Dumai yang mencapai 260 ribu jiwa.

Salah satu upaya pemerintah Provinsi Riau dalam menanggulangi masalah ini adalah melalui Program Pemberdayaan Desa (PPD) yang didasari oleh Keputusan Gubernur Riau nomor Kpts/132/BPPM/2005 Tanggal 31 Maret 2005 yaitu kebijakan untuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa/Kelurahan. Program ini menitikberatkan pada pemberdayaan

masyarakat dalam merealisasikan kesejahteraan menengah melalui Usaha Ekonomi Kelurahan - Simpan Pinjam (UEK-SP). Untuk di Kota Dumai sendiri Program ini sudah bergulir di Kota Dumai sejak tahun 2005 dan sampai saat ini sudah ada 33 UEK-SP yang ada, hal ini berarti di setiap kelurahan yang ada di Kota Dumai telah memiliki UEK-SP masing-masing.

Penanggulangan kemiskinan dengan menitik beratkan pada pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasional, merupakan wujud komitmen pemerintah dalam merealisasikan kesejahteraan bagi masyarakat. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan atau Program Pemberdayaan Masyarakat merupakan perwujudan nyata dari upaya menanggulangi kemiskinan di Provinsi Riau khususnya di Kota Dumai.

Seluruh proses kegiatan dalam Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan atau Program Pemberdayaan Masyarakat pada hakekatnya memiliki tiga dimensi, yaitu :

1. Memberdayakan masyarakat untuk menentukan sendiri kebutuhannya, merencanakan kegiatan pembangunan, melaksanakannya secara terbuka (transparan) dan penuh tanggung jawab.
2. Memberikan dukungan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif untuk mewujudkan peran masyarakat dalam pembangunan, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan mereka sendiri.
3. Menyediakan Dana Usaha Desa/ Kelurahan untuk pinjaman yang murah dan mudah guna

pengembangan ekonomi masyarakat desa/kelurahan.

Tujuan Program Pemberdayaan Desa (PPD) adalah mendorong kegiatan perekonomian perdesaan/ kelurahan; meningkatkan kreativitas berwirausaha; mendorong tumbuhnya usaha sektor informal; untuk penyerapan tenaga kerja; menghindarkan masyarakat dari pengaruh rentenir; memfasilitasi masyarakat untuk gemar menabung; serta meningkatkan dorongan berusaha bagi anggota masyarakat desa/ kelurahan yang berpenghasilan rendah.

Di Kota Dumai sendiri masalah utama yang terjadi dalam pelaksanaan program ini adalah masih cukup tingginya jumlah tunggakan pinjaman. Fenomena ini mengakibatkan daftar antrian pinjaman semakin menumpuk dan berpengaruh pada perkembangan UEK-SP. Hal inilah yang menarik penulis untuk melihat mengapa hal tersebut bisa terjadi. Karena permasalahan yang terjadi di tiap UEK-SP ini sama maka untuk melihat hal tersebut terjadi penulis akan melihat dari UEK-SP yang ada di Kelurahan Bukit Kayu Kapur Dari hal tersebut di atas penulis menguraikan fenomena-fenomena lain dilapangan yang penulis temukan yaitu :

1. Masih ada pemanfaat yang menggunakan dana pinjaman UED/K-SP tidak digunakan sesuai dengan Rencana Usulan Pinjaman (RUP).
2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar cicilan dan mereka masih beranggapan dana PPD ini masih sama dengan dana – dana program terdahulu yang begitu diterima tidak perlu dikembalikan dan pada akhirnya

akan diputihkan pemerintah juga. Bahkan sebagian masyarakat menganggap dana ini adalah sebagai dana hibah yang tidak harus dikembalikan.

3. Masi banyak warga yang tidak dalam kriteria masyarakat berpenghasilan rendah juga menikmati program ini.
4. Jumlah tunggakan pinjaman yang semakin tinggi.
5. Daftar antrian pinjaman yang semakin menumpuk.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Kualitatif dengan menganalisa data secara deskriptif.

Jenis Data yang digunakan ada dua yaitu, data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya.. Data tersebut berupa hasil wawancara tentang evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan desa melalui UEK-SP di kelurahan bukit kayu kapur kota dumai tahun 2012. Data Sekunder adalah data yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang didapatkan, seperti laporan- laporan, literatur- literatur, berkas kearsipan dan lampiran data lainnya yang diduplikasikan dimana dapat mendukung dan menjelaskan permasalahan serta untuk melengkapi data dalam penelitian ini.

Untuk mendapatkan data dan informasi dilakukan dengan wawancara mendalam kepada aktor-aktor yang terlibat dalam fenomena pelaksanaan UEK-SP Sejahtera Bersama yang akurat dalam penelitian ini. Informan dipilih berdasarkan penarikan sifat sampel

nonprobability yaitu dengan cara *Purposive* hanya orang-orang yang ahli dan mengerti tentang fenomena yang terjadi (Sugiyono, 2009: 91). Oleh karena itu penulis memilih informan yang merupakan orang-orang yang dianggap paling mengetahui dan ikut terlibat dalam pelaksanaan program UEK-SP di Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kota Dumai Tahun 2012 yaitu : Kabid Pemberdayaan Masyarakat Dinas Koperasi,UKM dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, Lurah Bukit Kayu Kapur, Ketua UEK-SP Sejahtera Bersama, Tata Usaha UEK-SP Sejahtera Bersama, Kasir UEK-SP Sejahtera Bersama, Staff Analisis Kredit UEK-SP Sejahtera Bersama dan Pemanfaat UEK-SP

Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa (PPD) melalui Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) di Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kota Dumai Tahun 2012.

Pemerintah Provinsi Riau berupaya dalam menanggulangi masalah kemiskinan melalui Program Pemberdayaan Desa (PPD) yang didasari oleh Keputusan Gubernur Riau nomor Kpts/132/BPPM/2005 Tanggal 31 Maret 2005 yaitu kebijakan untuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa/Kelurahan. Program ini menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat dalam merealisasikan kesejahteraan menengah melalui Usaha Ekonomi Kelurahan - Simpan Pinjam (UEK-SP). Untuk di Kota Dumai sendiri Program ini sudah bergulir di Kota Dumai sejak tahun 2005 dan sampai saat ini sudah ada 33 UEK-SP yang ada, hal ini berarti di setiap kelurahan yang ada di Kota Dumai telah memiliki UEK-SP masing-masing.

Program Pemberdayaan Desa (PPD) adalah program yang bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan berdasarkan pengembangan ekonomi masyarakat melalui pemberian Dana Usaha Kelurahan (DUK), memperkuat kelembagaan masyarakat Desa/Kelurahan dan peran aktif dinas sektoral untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana bagi masyarakat desa/kelurahan, serta mendorong kelembagaan sistem pembagi partisipatif. Pada dasarnya, PPD adalah program bantuan dalam rangka pemberdayaan kepada masyarakat dan memberikan bantuan dalam bentuk stimulant yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan ekonomi yang diusulkan oleh masyarakat yang sifatnya bergulir.

Dalam implementasinya terdapat dua jenis kegiatan pada Program Pemberdayaan Desa/Kelurahan, yaitu:

1. Kegiatan regular perencanaan pembangunan desa/kelurahan melalui sektoral.
2. Kegiatan bidang ekonomi mikro melalui Dana Usaha Desa/Kelurahan yang dikelola oleh Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan-Simpan Pinjam (UED/K-SP).

Pada Program Pemberdayaan Desa ini yang menjadi Program unggulannya adalah Usaha Ekonomi Kelurahan-Simpan Pinjam (UEK-SP). Karena Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam adalah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang dibentuk oleh kelurahan melalui musyawarah untuk mengelola Dana Usaha Desa dan dana yang berasal dari kegiatan Simpan Pinjam.

Bentuk nyata dari program ini adalah untuk melayani masyarakat usaha ekonomi kecil yang ingin memanfaatkan pinjaman modal dari kantor kelurahan di kota Dumai untuk mengembangkan usahanya. Dengan demikian, usaha ekonomi Kelurahan Simpan-Pinjam (UEK-SP) yang ada di beberapa kelurahan di Kota Dumai adalah salah satu alternatif lembaga keuangan non bank yang dapat memberikan perhatian kepada masyarakat ekonomi lemah.

Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) adalah program yang bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat, penyediaan Dana Usaha Desa dan penguatan koordinasi serta sinergi sektoral dalam pembangunan desa secara partisipatif. Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh suatu masyarakat sehingga mereka dapat mengaktualisasikan jati dirinya, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Dengan demikian pemberdayaan adalah suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik.

a. Pemberdayaan di bidang ekonomi, berarti menyangkut upaya peningkatan pendapatan dan tingkat kesejahteraan hidup yang bertumpu pada kekuatan ekonomi sendiri sehingga masyarakat mampu memenuhi

kebutuhan hidupnya secara mandiri.

- b. Pemberdayaan di bidang sosial budaya, berarti menyangkut upaya peningkatan kehidupan sosial budaya yang berakar pada nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat setempat sehingga mereka tidak tercabut dari akar budaya yang telah melingkupi kehidupan mereka selama ini.
- c. Pemberdayaan di bidang politik, berarti menyangkut upaya peningkatan kemampuan dan pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk mengambil keputusan sendiri mulai dari proses perencanaan sampai dengan pemantauan dan evaluasi berbagai program pembangunan yang mereka laksanakan.

Agar lebih jelas mengenai Program Pemberdayaan Desa melalui Usaha Ekonomi Kelurahan – Simpan Pinjam (UEK–SP) dalam penelitian ini, maka usaha yang dilakukan adalah dengan mengevaluasi pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa melalui UEK–SP di Kota Pekanbaru. Dengan ini maka penulis uraikan secara rinci mengenai indikator evaluasi pelaksanaan program yang ada. Adapun indikator dari evaluasi pelaksanaan program PPD dalam penelitian ini adalah :

Menurut Nurcholis (2005 : 146) Evaluasi adalah proses yang mendasarkan diri pada disiplin ketat dan tahapan waktu. Oleh karena itu harus membuat skema umum dalam penilaian dan membuat seperangkat instrument yang meliputi parameter dan indikator. Skema umum dalam evaluasi adalah input, proses, output dan outcomes.

Sehubungan dengan diterapkannya program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) di Kelurahan Bukit Kayu Kapur tahun 2007 lalu, maka melalui penelitian ini akan dapat di ketahui hasil dari kebijakan yang telah di lakukan untuk Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa melalui Usaha Ekonomi Simpan Pinjam (UEK-SP) di Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kota Dumai Tahun 2012.

1. Input

Masukan yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan. Yang artinya bahwa bagaimana prosedur pelaksanaan UEK-SP tersebut di Kelurahan Bukit Kayu Kapur, yaitu di Kantor UEK-SP Sejahtera Bersama. Untuk itu dikembangkan instrument yang memiliki sub indikator sebagai berikut :

- a) Sumber daya utama
 1. Sumber dana UEK-SP.
 2. Tingkat SDM pengelola maupun pemanfaat UEK SP.
 3. Tingkat Ekonomi Pengelola
- b) Bahan-bahan dasar pendukung (sarana dan prasarana pada UEK-SP)
 - a) **Sumber Daya Utama** (Sumber dana, tingkat SDM dan pengalaman pengelola maupun pemanfaat, dan tingkat ekonomi pengelola).

1. Sumber Dana UEK-SP

Ketentuan UEK-SP dalam pemberian bantuan modal usaha berupa Dana Usaha Desa/Kelurahan adalah dapat digunakan untuk kegiatan usaha ekonomi produktif dan simpan pinjam. Modal usaha ini diberikan kepada masyarakat yang kekurangan modal usaha. Meningkatkan kesempatan berusaha serta memiliki potensi untuk berkembang dan berkelanjutan yang

merupakan sasaran utama dari pemberian modal usaha tersebut.

Berikut hasil wawancara penulis dengan Ketua UEK SP Sejahtera Bersama, Bapak M. Ilyas S.Pd mengungkapkan terkait sumber dana UEK SP pada tanggal 8 November 2013, pukul 11.15 wib, berikut ungkapan beliau:

“Pelaksanaan UEK-SP di Kelurahan Bukit Kayu Kapur dimulai pada tahun 2007. Sumber dana berasal dari APBD Kota Dumai dengan nominal Rp.500.000.000. Kemudian dana tersebut digulirkan kepada masyarakat pengelola usaha informal yang berada dikelurahan tersebut yang berkeinginan untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif mereka dengan memanfaatkan sumber daya serta dana yang tersedia sebagai modal usahanya. Disini siapa saja boleh melakukan pinjaman, kami tidak mengelompokkan hanya masyarakat miskin saja yang bisa melakukan pinjaman yang penting mereka bisa mengembalikan pinjaman tersebut dan untuk mendapatkan dana tersebut calon pemanfaat harus memenuhi kelengkapan administrasi dan prosedur-prosedur yang ada pada UEK-SP Sejahtera Bersama dan sesuai dengan Juknis/Juklak”.

Dari hasil wawancara diatas dapat kita lihat bahwa UEK-SP di Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kota Dumai pendanaannya berasal dari APBD Kota Dumai senilai RP. 500.000.000,-. Namun dana tersebut tidak hanya di peruntukkan untuk masyarakat miskin yang kekurangan modal usaha tetapi juga bisa dinikmati oleh masyarakat yang tidak tergolong masyarakat miskin. Dimana hal ini tentu saja tidak sejalan dengan tujuan program Usaha

Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) itu sendiri. Karena seharusnya dana yang dipinjamkan kepada pemanfaat UEK-SP adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah yang memiliki keinginan untuk mengembangkan usaha mereka dan hal ini diharapkan dapat menekan angka kemiskinan dan tujuan dari program pemerintah ini dapat tercapai.

2. Tingkat SDM dan Pengalaman Pengelola maupun Pemanfaat

Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan kemiskinan sangat diperlukan suatu proses pemberdayaan, dimana keberdayaan suatu masyarakat sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung sebagai prasyaratnya. Diantaranya adalah faktor pendidikan, kesehatan, penguasaan akses sumber-sumber kemajuan ekonomi dan faktor sosial budaya. Keterpaduan dari berbagai faktor tersebut secara serasi akan membentuk suatu kekuatan yang memungkinkan suatu masyarakat yang dapat bertahan (*survive*) dan mengembangkan diri secara mandiri dalam kondisi apapun untuk mencapai tujuan hidupnya.

Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK SP) menuntut untuk menempatkan masyarakat atau rakyat sebagai pusat perhatian dan sasaran sekaligus pelaku utama dalam setiap tahapan kegiatan. UEK SP juga memberikan pendampingan kepada masyarakat untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan kapasitas, memfasilitasi masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan, membantu menggali potensi desa/kelurahan dan menjaga kualitas setiap tahapan kegiatan.

Menurut Ibu Erda Sriyani, Kabid Pemberdayaan Masyarakat Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai menanggapi sumber daya manusia dan pengalaman pengelola maupun pemanfaat UEK SP Sejahtera Bersama pada tanggal 2 Januari 2014 pukul: 09.20 wib mengatakan:

“Sumber Daya Manusia atau yang biasa disingkat SDM pengelola dan pengalamannya memang sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan UEK-SP di sini yaitu dengan SDM yang tinggi dapat memperlancar kegiatan UEK-SP ini dalam berbagai aspek. Sedangkan kalau dari pemanfaat itu sendiri SDM tidak terlalu berpengaruh karena disini yang dibutuhkan adalah kegigihan dari peminjam atau pemanfaat di dalam pengembangan usahanya serta pengalaman usaha mereka”.

Selain itu berikut hasil wawancara dengan Lurah Bukit Kayu Kapur, bapak Ruswan pada tanggal 16 Januari 2014 pukul: 10.05 wib berkenaan dengan tingkat SDM dan pengalaman pengelola. Berikut petikan wawancara penulis dengan beliau :

“Tingkat pendidikan pengelola sangat berpengaruh terhadap perkembangan UEK-SP. Pada UEK-SP ini pengelola memang sudah ada yang sarjana, walaupun mereka punya gelar kesarjanaan tetapi mereka juga harus mempunyai pengalaman dan kami melihat pengelola UEK-SP di sini sudah cukup baik”.

Dari hasil wawancara dan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat SDM dan pengalaman pengelola dalam memimpin suatu organisasi itu penting, agar UEK-SP ini dapat bertahan dan berkembang.

Selain itu juga dapat dilihat bahwa pengelola UEK-SP Kelurahan Bukit Kayu Kapur sudah memiliki SDM dan pengalaman yang baik. Serta dari pemanfaat juga dibutuhkan pengalaman yang baik dalam melakukan usaha, agar nantinya dana UEK-SP yang dipinjamkan dapat dimanfaatkan sesuai dengan bidang usaha yang dimilikinya, dan usaha yang mereka miliki dapat berkembang, sehingga tujuan dari program ini bisa tercapai.

3. Tingkat Ekonomi Pengelola UEK-SP

Pada dasarnya, PPD adalah program bantuan dalam rangka pemberdayaan kepada masyarakat dan memberikan bantuan dalam bentuk stimulant yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan ekonomi yang diusulkan oleh masyarakat yang sifatnya bergulir.

Selain itu dengan pengelola memiliki usaha sampingan selain mengelola UEK-SP, maka dapat menghindarkan pengelola UEK-SP untuk menggunakan dana usaha kelurahan yang ada untuk kepentingan pribadi, karena kemampuan pengelola juga berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan UEK-SP.

Berikut hasil wawancara penulis dengan Ketua UEK-SP, Bapak M. Ilyas S.Pd mengungkapkan terkait tingkat ekonomi pengelola UEK-SP, pada tanggal 16 Januari 2014 pukul: 13.55 wib beliau mengatakan :

“Selain mengelola UEK-SP di sini, saya juga memiliki kerja sampingan. Saya mempunyai toko yang menjual barang harian yg di kelola bersama keluarga saya di rumah”.

Selain itu hal senada juga di sampaikan oleh staf analisis kredit UEK-SP, Ibu Ade Zuliani SE. Sy di Kantor UEK-SP Sejahtera Bersama, pada tanggal yang sama yaitu tanggal 16 Januari 2014 pada pukul: 11.00 wib, beliau menyatakan :

“Saya punya usaha bengkel. Usaha bengkel tersebut sudah ada sebelum saya mengelola UEK-SP ini. Bengkel ini saya kelola bersama suami saya.

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa pengelola UEK-SP mapan dalam segi ekonomi sehingga kegiatan UEK-SP Sejahtera Bersama dapat terlaksana dengan baik hingga saat ini dan tidak terjadi penggunaan dana Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) untuk kepentingan pribadi.

b) Bahan–Bahan Dasar Pendukung

Sarana dan Prasarana pada UEK – SP

Berikut petikan wawancara penulis dengan Ketua UEK SP Sejahtera Bersama, Bapak M.Ilyas S.Pd pada tanggal 10 Desember 2013 pukul 13.45 wib:

“Sarana dan prasarana di Kantor UEK SP Sejahtera Bersama saat ini sudah cukup memadai sehingga proses administrasi sudah berjalan dengan cukup baik dan mengenai pembukuan memang kami akui masi belum optimal tetapi saat ini kami juga berusaha membuat laporan keuangan yang baik supaya jelas perkembangannya”.

Mengenai sarana dan prasarana pada UEK–SP ini sudah memadai hingga kini. Dan aktifitas UEK-SP sudah berjalan lancar. Dari hasil wawancara penulis dengan beberapa informan dapat disimpulkan bahwa INPUT yang

terdapat pada UEK-SP Kelurahan Bukit Kayu Kapur sudah “cukup baik”. Terlihat dari tingkat SDM dan pengalaman pengelola dan pemanfaat serta sarana dan prasarana yang ada sudah cukup baik walaupun masih ada masyarakat yang tidak dalam kriteria masyarakat berpenghasilan rendah masih mendapatkan pinjaman dari UEK-SP Sejahtera Bersama.

2. Proses

Bagaimana sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat, dengan sub indikator pelaksanaan TUPOKSI oleh pengelola UEK-SP, serta penerapan prinsip-prinsip UEK SP dalam setiap kegiatan mulai dari sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian sampai pengembangan kegiatan.

Penerapan prinsip-prinsip Program Pemberdayaan Desa (PPD) yaitu keberpihakan kepada orang miskin, transparansi, partisipasi, desentralisasi, kompetisi sehat dalam setiap kegiatan mulai dari sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian sampai pengembangan kegiatan.

Menurut Ibu Defa Sufmita, bagian kasir di UEK SP Sejahtera Bersama mengenai proses UEK SP yang sudah berjalan selama ini pada tanggal 23 Oktober 2013 pukul 11.15 wib, beliau mengatakan :

“Kami sudah menjalankan TUPOKSI dengan baik dan sesuai dengan penerapan prinsip-prinsip PPD dan sudah sesuai dengan prosedur yang ada serta sesuai dengan mekanisme Juknis dan Juklak yang ada”.

Hal tersebut bertolak belakang dengan yang penulis temui

di lapangan, pihak UEK-SP masih memberikan dana pinjaman kepada pemanfaat yang beralasan ingin membangun rumah tentu saja hal ini tidak sesuai dengan tujuan program dan persyaratan pemanfaat ini yaitu untuk mendorong kegiatan perekonomian masyarakat serta harus memiliki usaha atau rencana usaha.

Mengkonfirmasi hal tersebut penulis melakukan wawancara kepada Ketua UEK-SP Bapak Ilyas S.Pd beliau mengatakan :

“Pihak UEK-SP akan memberikan dana pinjaman kepada pemanfaat dan mereka bebas menggunakan dana tersebut untuk keperluan apapun karena menurutnya yang terpenting adalah mereka harus mengembalikan dana pinjaman tersebut”.

Dalam hal ini seharusnya tim verifikasi/pengawas seharusnya lebih berperan aktif Melakukan pengawasan umum terhadap pelaksanaan kegiatan UEK-SP, evaluasi sasaran program serta pemanfaatannya. Memastikan penyaluran DUK telah memenuhi syarat dan ketentuan program yang berlaku. Memantau realisasi penyaluran dan pengembalian pinjaman DUK. Mendorong masyarakat pemanfaat/peminjam bertanggung jawab dalam pengelolaan DUK, sehingga pengembalian tepat waktu dan perguliran berjalan dengan baik. Sehingga kemungkinan terjadi hal-hal tersebut diatas dapat diminimalisir.

Sebelum melakukan peminjaman masyarakat harus memenuhi persyaratan dan ini sudah sesuai dengan ketentuan atau prosedur yang ada. Tetapi tetap ada saja di temui dalam verifikasi data

dan survey ke lapangan masih terjadi kerjasama terselubung antara tim verifikasi dan pemanfaat dana UEK-SP sehingga dana bergulir tidak tepat sasaran. Dan pada saat itu juga banyak terjadi penunggakan oleh pemanfaat karena mereka merasa dana tersebut adalah dana bagi-bagi atau hibah yang tidak perlu dikembalikan. Hal ini terjadi karena kurang sosialisasi dan kurang ketatnya pengawasan dari pengelola UEK-SP.

Dari hasil wawancara dan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan PROSES kegiatan UEK-SP di Kelurahan Bukit Kayu Kapur "kurang baik". Dilihat dari pelaksanaan TUPOKSI oleh pengelola UEK-SP yang belum terlaksana dengan baik, sehingga masyarakat yang mendapatkan manfaat dari program ini tidak tepat sasaran dan ini juga disebabkan oleh pelaksanaan verifikasi yang tidak sesuai dengan Juknis yang ada sehingga tingkat penunggakan masyarakat semakin tinggi.

3. Output

Hasil dari pelaksanaan kebijakan. Apakah suatu pelaksanaan kebijakan menghasilkan produk sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, dengan indikator keberhasilan program UEK-SP berkembang dilihat dari perkembangan dana yang meningkat. Dengan sub indikatornya adalah sebagai berikut :

a. Perkembangan Dana dan Tingkat Pengembalian Pinjaman.

Berikut hasil wawancara penulis dengan Tata Usaha UEK-SP Sejahtera Bersama pada tanggal 10 Agustus 2013, pukul: 10.15 wib,

terkait perkembangan dana dan tingkat pengembalian pinjaman dari pelaksanaan UEK-SP di Kelurahan Bukit Kayu Kapur, berikut tanggapan beliau:

"Dana awal yang berasal dari APBD Kota Dumai yaitu Rp. 500.000.000 pada akhir 2012 berkembang dengan sangat pesat dan jumlah dana yang sudah bergulir sudah mencapai dana Rp.3,2 M dengan tingkat pengembalian 95%".

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa perkembangan dana pada UEK-SP Sejahtera Bersama Kelurahan Bukit Kayu Kapur mengalami peningkatan dengan tingkat pengembalian pinjaman sebesar 95%.

b. Permasalahan pada UEK-SP dan solusinya.

Adapun tujuan dilaksanakannya Program Pemberdayaan Desa (PPD) adalah untuk :

1. Mendorong kegiatan perekonomian masyarakat desa/kelurahan.
2. Meningkatkan dorongan berusaha bagi anggota masyarakat desa/kelurahan yang berpenghasilan rendah.
3. Mendorong usaha sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat desa/kelurahan.
4. Menghindarkan masyarakat dari praktek ijon atau rentenir.
5. Meningkatkan peranan masyarakat dalam pengelolaan Dana Usaha Desa/Kelurahan.
6. Meningkatkan kebiasaan gotong-royong dan gemar menabung secara tertib.
7. Meningkatkan peran perempuan dalam perencanaan dan

- pelaksanaan kegiatan desa/kelurahan.
8. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat desa/kelurahan.

Agar tujuan program tersebut tercapai maka dalam pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar PPD, yaitu :

1. Keberpihakan kepada orang miskin

Setiap kegiatan yang

2. Transparansi

Seluruh operasional kegiatan PPD harus dilakukan secara transparan (terbuka)

dan diketahui oleh masyarakat luas. Dengan transparansi atau keterbukaan maka segala sesuatu yang dilakukan akan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (accountable).

3. Partisipasi

Adanya keterlibatan masyarakat secara aktif terutama kelompok miskin dalam setiap tahap kegiatan PPD, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian dan pengembangan kegiatan.

4. Desentralisasi

Pemberian kewenangan kepada masyarakat atau lebih mendasar adalah sejauh mana masyarakat memperoleh hak-haknya yang otonom untuk mengelola pembangunan secara mandiri dan partisipatif.

5. Kompetisi sehat

Setiap pengambilan keputusan penting dalam PPD dilakukan melalui musyawarah dan bersifat kompetisi secara sehat untuk menentukan prioritas kegiatan yang didanai, berdasarkan hasil kajian

terhadap berbagai alternatif pilihan untuk mendapatkan pilihan terbaik.

Berikut hasil wawancara penulis dengan Ketua UEK-SP Sejahtera Bersama pada tanggal 10 Agustus 2013, pukul: 11.40 wib, terkait permasalahan pada UEK-SP dan solusi dari UEK-SP Kelurahan Bukit Kayu Kapur, beliau menyatakan :

“Permasalahan yang terjadi pada UEK-SP ini adalah penunggakan dari pemanfaat. Dimana jumlah penunggakan cukup banyak dan semakin tinggi karena penunggakan yang terjadi sekitar Rp. 144.699.888 dari jumlah dana yang berkembang yaitu dari Rp. 3,2 M dan merupakan tunggakan tertinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Sejauh ini penunggakan terjadi karena usaha yang macet, dan lupa kalau sudah jatuh tempo pembayaran bahkan ada juga yang menganggap dana ini dana pemerintah dan tidak perlu dikembalikan. Untuk mengatasi permasalahan penunggakan ini dengan cara mendatangi pemanfaat untuk melakukan sharing mengenai sebab penunggakan dan mengingatkan pemanfaat bahwa pembayaran sudah jatuh tempo. Selain itu di dalam pelaksanaannya UEK-SP ini masih mengalami kendala yaitu penunggakan dan sejauh ini penunggakan tersebut disebabkan oleh tingkat masyarakat yang berbeda-beda dalam bidang usahanya misalnya ada kebutuhan-kebutuhan mendadak yang sangat besar yang harus didahulukan sehingga harus menggunakan dana yang seharusnya digunakan untuk pengembalian dan juga ada masyarakat yang menggunakan dana ini untuk keperluan yang tidak seharusnya seperti membayar hutang, membayar kredit motor,

bahkan ada untuk membangun rumah dan lain- lain sehingga tidak bisa membayar pada waktu pengembalian. Untuk penyelesaiannya pengelola melakukan pendekatan kepada pemanfaat tersebut dengan cara pelan-pelan namun kami tidak melakukan pelelangan agunan karena suatu saat nanti mereka pasti membutuhkan dan akan mengambil agunan tersebut”.

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Erda Sriyani hasil Wawancara tanggal 23 Oktober 2013, Beliau Mengatakan :

“Masalah utama yang menjadi kendala keberlangsungan UEK-SP adalah tunggakan yang masih cukup tinggi khususnya di Bukit Kayu Kapur beliau mengatakan bahwa tingkat kesadaran masyarakat dalam pengembalian pinjaman masih cukup rendah oleh karena itu diperlukan pemahaman yang kuat baik dengan sharing atau pendekatan persuasif agar masyarakat mengerti pentingnya membayar angsuran pinjaman dana usaha tersebut. Selain itu pemerintah juga melaksanakan Rakor yang diadakan setiap tiga bulan sekali dimana diharapkan dengan adanya Rakor tersebut pemerintah dapat menampung keluhan-keluhan dari pengurus UEK-SP terkait keberlangsungan program ini kedepannya”.

Berdasarkan analisa penulis dari hasil wawancara yang dilakukan dan dari tabel di atas permasalahan pada UEK-SP di Kelurahan Bukit Kayu Kapur adalah adanya penunggakan dari pemanfaat. Dimana penunggakan ini cukup banyak dan semakin tinggi setiap tahun nya. Adapun penyelesaian atau

solusi yang di lakukan oleh pengelola UEK-SP adalah dengan melakukan sharing mengenai penyebab penunggakan dan mengingatkan pemanfaat bahwa pembayaran sudah jatuh tempo, namun pemanfaat yang telah lama tidak membayar pengembalian tidak di beri sanksi oleh pengelola dan agunan pemanfaat yang ada di UEK-SP itu pun tidak dilakukan pelelangan dengan alasan bahwa pemanfaat tersebut suatu saat nanti akan membutuhkan dan akan mengambil agunan mereka yang ada di UEK-SP. Dari hal ini penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pengelola UEK-SP tidak tegas dalam melaksanakan tugasnya dan adanya faktor nepotisme atau dengan kata lain karena faktor kekeluargaan sehingga mengakibatkan penunggakan semakin tinggi.

a. Tingkat Perguliran

Untuk tingkat perguliran berikut hasil wawancara penulis di Kantor UEK-SP Sejahtera Bersama dengan kasir , Ibu Deva Sufmita pada tanggal 10 Agustus 2013 pukul: 10.30 wib, berikut tanggapan beliau : *“Untuk perguliran tidak selalu ada setiap bulannya. Karena adanya penunggakan dari pemanfaat sebelumnya sehingga daftar antrian pinjaman semakin menumpuk. Apabila tunggakan sudah di bayarkan maka baru pemanfaat berikutnya bisa meminjam ke sini (UEK-SP) dan waktunya tidak bisa di tentukan, bisa dalam waktu 1 bulan bisa juga 2 bulan berikutnya. Selain itu dana yang sudah digulirkan hingga saat ini sudah mencapai Rp. 3,2 M”.*

Output dari pelaksanaan UEK-SP melalui UEK-SP Sejahtera Bersama di Kelurahan Bukit Kayu

Kapur ternyata “kurang baik”. Terlihat dari adanya permasalahan pada UEK-SP itu sendiri tetapi pengelola tidak mampu memberikan solusi yang baik atas permasalahan tersebut. Dimana permasalahan nya adalah terjadinya penunggakan oleh pemanfaat sehingga perguliran tidak bisa dilakukan setiap bulan nya dan juga mengakibatkan daftar antrian pinjaman semakin menumpuk.

4. Outcomes

Apakah suatu pelaksanaan kebijaksanaan berdampak nyata terhadap kelompok sasaran dengan tujuan kebijakan. Dengan sub indikator :

- a) Dana diserap baik oleh masyarakat dan usaha pemanfaat berkembang.
- b) Untuk UEK-SP yang sudah berjalan 5 tahun harus sudah menjadi BUM-Des atau BUM-Kel (Badan Usaha Milik Desa/Kelurahan).

Penyerapan Dana Serta Perkembangan Usaha Pemanfaat UEK-SP

Salah satu upaya pemerintah Provinsi Riau dalam menanggulangi masalah kemiskinan adalah melalui Program Pemberdayaan Desa (PPD) yang didasari oleh Keputusan Gubernur Riau nomor Kpts/132/BPPM/2005 Tanggal 31 Maret 2005 yaitu kebijakan untuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa/ Kelurahan. Program ini menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat dalam merealisasikan kesejahteraan menengah melalui Usaha Ekonomi Kelurahan - Simpan Pinjam (UEK-SP).

Menurut Bapak Hendarto, salah satu masyarakat yang menjadi pemanfaat UEK-SP Sejahtera Bersama dengan menanggapi adanya program UEK-SP ini pada tanggal 12 Agustus 2013, berikut tanggapan beliau :

“Manfaat yang saya rasakan dengan adanya UEK-SP ini dapat membantu saya mengembangkan usaha bengkel yang saya miliki. Selain itu dengan adanya program ini mengurangi ketergantungan saya terhadap rentenir karena sebelumnya saya pinjam modal kepada rentenir yang tentu saja dengan bunga yang tinggi”.

Namun pendapat yang berbeda di sampaikan oleh pemanfaat UEK-SP lainnya, Ibu Zurnetty mengenai manfaat atau dampak dari adanya program UEK-SP ini, beliau menyatakan :

“Saya belum merasakan dampak yang berarti dari adanya program UEK SP ini, karena harga- harga kebutuhan pokok semakin meningkat dan tidak menentu, sementara usaha saya adalah usaha yang berkenaan dengan kebutuhan-kebutuhan pokok tersebut. Saya mempunyai usaha kecil-kecilan, dimana setiap harinya saya berjualan lotek, lontong, bubur dan goreng-gorengan. Tetapi pendapatan yang saya dapatkan setiap harinya tidak cukup mampu untuk menutupi uang pengembaliannya dan sekarang usaha saya masih belum menampakkan perkembangannya”.

Selain itu berikut tanggapan salah satu anggota PKK di Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kota Dumai mengenai outcomes dari pelaksanaan UEK-SP di Kelurahan tersebut, beliau menyatakan :

“ Sejauh ini saya melihat UEK-SP yang di laksanakan di daerah kita cukup membantu perkembangan usaha masyarakat. Dimana sebelum adanya UEK-SP ini masyarakat yang ingin mengembangkan usaha mereka tidak mampu melakukannya karena kekurangan modal. Tetapi dengan

adanya UEK-SP ini masyarakat menjadi terbantu dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat”.

Kemudian berikut hasil wawancara penulis dengan staff analisis kredit, Ibu Ade Zuliani. SE, mengenai outcomes dari program UEK-SP ini, beliau mengatakan :

“Dampak program ini sebenarnya cukup bagus, dengan adanya UEK-SP ini dapat menunjang usaha masyarakat. Pemanfaat pada UEK-SP ini saja yang tidak bisa menggunakan dana tersebut dengan baik dan sering menyalahgunakan dana tersebut. Sejauh ini permasalahan yang terjadi adalah penunggakan yang disebabkan oleh faktor skill, kurangnya tanggung jawab serta kelalaian pemanfaat itu sendiri dengan alasan dananya tidak cukup”.

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Outcomes pada UEK-SP Sejahtera Bersama di Bukit Kayu Kapur “cukup baik”. Walaupun penyerapan dana yang belum secara maksimal menyentuh masyarakat berpenghasilan rendah yang kekurangan modal usaha tetapi perkembangan usaha masyarakat yang menjadi pemanfaat UEK-SP sudah mulai berkembang.

Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian di lapangan mengenai Program Pemberdayaan Desa (PPD) Melalui Usaha Ekonomi Kelurahan-Simpan Pinjam (UEK-SP) di Kelurahan Bukit Kayu Kapur dengan menggunakan alat evaluasi input, proses, output dan outcomes penulis mengambil kesimpulan bahwa Pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa (PPD) Melalui Usaha Ekonomi

Kelurahan-Simpan Pinjam (UEK-SP) di Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kota Dumai Tahun 2012 adalah “kurang baik” yaitu :

1. Pelaksanaan TUPOKSI oleh pengelola UEK-SP yang belum terlaksana dengan baik, sehingga masyarakat yang mendapatkan manfaat dari program ini tidak tepat sasaran dan ini juga disebabkan oleh pelaksanaan verifikasi yang tidak sesuai dengan Juknis yang ada sehingga tingkat penunggakan masyarakat semakin tinggi.
2. Penunggakan oleh pemanfaat sehingga perguliran tidak bisa dilakukan setiap bulan nya dan juga mengakibatkan daftar antrian pinjaman semakin menumpuk.
3. Penyerapan dana yang belum secara maksimal menyentuh masyarakat berpenghasilan rendah yang kekurangan modal usaha

Saran

Setelah memperhatikan hasil-hasil penelitian ini, maka ada beberapa saran yang peneliti berikan dalam rangka meningkatkan Program Pemberdayaan Desa (PPD) melalui Usaha Ekonomi Kelurahan-Simpan Pinjam (UEK-SP) di Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kota Dumai. Adapun saran tersebut adalah :

1. Kepada pihak UEK-SP Sejahtera Bersama di Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kota Dumai sebaiknya lebih menekankan lagi fungsi pengawasan, baik sebelum maupun sesudah pemberian bantuan Dana Usaha Desa/Kelurahan. Sehingga tidak terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran dalam penggunaan Dana Usaha Desa/Kelurahan.

2. Kepada pihak Tim Verifikasi sebaiknya lebih fokus lagi terhadap tugas dan tanggung jawab dalam mengecek ke lapangan mengenai bentuk dan jenis usaha calon pemanfaat/peminjam. Sehingga tidak terjadi lagi penyimpangan dan kesalahan dalam menentukan calon pemanfaat yang layak menerima bantuan modal usaha tersebut.
3. Kepada Pemerintah Provinsi Riau sebagai pembuat kebijakan hendaknya melakukan evaluasi secara menyeluruh dan komprehensif pada pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa/Kelurahan (PPD) melalui Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam ini karena dari hasil penelitian penulis menjumpai berbagai masalah dalam pelaksanaan program ini. Sehingga evaluasi dari pemerintah hendaknya dilakukan agar apa yang menjadi tujuan dan sasaran dapat tercapai yaitu pemberdayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta. Gramedia Utama.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press
- Goudzwaard, Bob. Harry de Lange. 1998. *Dibalik Kemiskinan dan Kemakmuran*. Yogyakarta. Kanisius
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta. Gaya Media
- Kansil, CST, dan Cristine. 2008. *Sistem Pemerintah Indonesia*. Jakarta. Bumi Aksara
- Ndraha, Taliziduhu . 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) I*. Jakarta. Rineka Cipta
- _____. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) II*. Jakarta. Rineka Cipta
- _____. 2005. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) III*. Jakarta. Rineka Cipta
- Nogi, Hesel. Tangkilisan. 2003. *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Yogyakarta. Lukman Offset
- Sherraden, Michael. 2006. *Aset Untuk Orang Miskin Perspektif Baru Usaha Pengentasan Kemiskinan*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada
- Subarsono, AG. 2009. *Analisis Kebijakan Publik Konsep , Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Thoha, Miftah. 2007. *Birokrasi dan Politik Indonesia*. Jakarta. Rajawali Pers
- Zainal Abidin, Said. 2002. *Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Jakarta. Yayasan Pancur Siwah

Referensi Lain :

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Gubernur Riau Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa Provinsi Riau
- Hadiyanti, Puji, 2006. Kemiskinan dan Upaya Pemberdayaan Masyarakat: *Jurnal Pengembangan Islam Volume 2, No 1* (online), komunitas.wikispaces.com/.../kemiskinan+dan+upaya+pemberdayaan+masyarakat.pdf. diakses 14 Desember 2012